

ABSTRAK

Permasalahan harta bersama sering muncul dalam masyarakat, permasalahan ini sering menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagian harta bersama karena pada waktu perkawinan tidak ada perjanjian harta bawaan akan menjadi milik bersama dan pada waktu perceraian permasalahan ini sering muncul, maka pengadilan menyarankan kepada suami istri untuk melakukan sita maritaal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengajukan banding terhadap putusan perkara No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara No.491/PdtG/2015/PT.Smg serta untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita maritaal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian Pertama: alasan tergugat mengajukan banding terhadap putusan perkara No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg bahwa tergugat mengajukan banding karena gugatan penggugat mengada-ada atau nominal yang disampaikan terlalu berlebihan., Kedua: Pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg Pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi memutuskan harta yang dibawa tergugat tidak termasuk harta bersama dan memutuskan harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, pembagian bisa dilakukan dengan natural ataupun in-natural., Ketiga: Pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita maritaal oleh penggugat/pemohon bila terjadi perceraian, dalam arti sempit dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 Tahun 1975, penetapan lembaga sita maritaal hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian, akan tetapi dalam arti luas sita maritaal bisa diartikan meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami istri, seperti pada perkara perceraian, perkara pembagian harta bersama dan pada perbuatan yang akan membahayakan harta bersama.

Kata kunci: Perceraian, Harta Bersama, Sita Maritaal

ABSTRACT

The Problem of shared assets (treasure gono-gini) often arises in the community, this problem often creates disputes between the two parties in the distribution of shared assets because at the time of marriage there is no agreement the property will be shared when the divorce issue often arises, the court suggested to husband and wife to confiscate beslag maritaal. This study aims to find out the reasons for filing an appeal against a court ruling No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg, to find out how judges consider high court in dropping case decisions No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg, and to know the legal arrangements regarding the joint position of property in marriage by doing it beslag maritaal.

The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis of research specifications, the data used are primary data obtained through interviews and secondary data which is characterized by primary legal material and secondary legal material where data collection is done by means of literature studies, document studies and chest processing field studies are carried out in a qualitative manner.

First result: the reason the defendant filed an appeal against the case decision No.491 / Pdt.G / 2015 / PT. Smg that the defendant filed an appeal because the claim of the plaintiff was contrived or nominally delivered too much., Second: Consideration of Judges in the Court of Appeal in dropping case decision No.491 / Pdt.G / 2015 / PT. Smg Consideration of Judges in High Court decides that the assets brought by the defendant do not include joint assets and decide on joint assets divided by 1/2 (one half) part, the distribution can be done naturally or in-natural. Third: Legal arrangements regarding joint property in marriage with the seizure of maritaal by the plaintiff / applicant if there is a divorce, in the narrow sense of the provisions of Article 24 paragraph (2) letter c PP No.9 of 1975, the determination of seizure institutions is limited to cases divorce lawsuit, but in a broad sense seizure maritaal can be interpreted to include several disputes that arise between husband and wife, se In case of divorce, the case of sharing property together and on actions that will endanger the common property.

Keywords: Divorce, Joint Property, Marital Beslag